

Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.:
Hakim PA, Jangan Lupakan Ushul Fiqih!

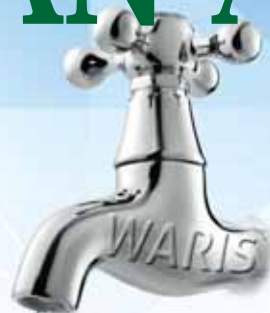
H. Suwardi, S.H., M.H.:
Mau Enjoy Mutasi? Ini Kuncinya

MAJALAH

EDISI 10 | DESEMBER 2016

PERADILAN AGAMA

www.badilag.net



Dinamika Hukum Waris DI INDONESIA



ISSN 2355-2476



9 772355 247003

TOKOH KITA : DR., DRS. H. A. MUKTI ARTO, S.H., M.HUM

Selamat Memasuki Masa Purnabhakti



Drs. H. Hasan Bisri, S.H., M.Hum.

(Ketua PTA Makassar)



Drs. H. Mujtahidin, S.H., M.H.

(Ketua PTA Bandar Lampung)

Terimakasih atas karya dan pengabdian yang telah
diberikan untuk lembaga peradilan di Indonesia



**KELUARGA BESAR
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
MAHKAMAH AGUNG RI**

2 Salam Redaksi

3 Editorial

4 Laporan Utama

Islam menjunjung tinggi pertalian kekerabatan. Sebagai bentuk penghargaan pada kekerabatan maka ditetapkan hubungan saling mewarisi di antara mereka. Bahkan, untuk memenuhi rasa keadilan, dinamika hukum waris Islam di Indonesia mengetengahkan penerapan wasiat wajibah dan ahli waris pengganti.

29 Tokoh Bicara

32 Fenomenal

36 Putusan Mancanegara

Sekularisme yang kuat dalam norma-norma dasar konstitusi Amerika Serikat menjadi "batu uji" yang sangat signifikan terhadap ketentuan-ketentuan hukum waris Islam di negara tersebut. Bagaimana kedua hukum tersebut berdialektika dalam praktek penerapan hukum waris Islam di pengadilan dan masyarakat muslim Amerika Serikat?

45 Opini

54 Wawancara Eksklusif

57 Tokoh Kita

"Maaf Pak, ada tamu," kata Sekda Kabupaten Sukoharjo. "Siapa?" kata Bupati Sukoharjo. "Pak Mukti," jawab Sekda. "Suruh sini," timpal Bupati. Begitu masuk ruangan, sang Bupati langsung komentar: "Iki ngopo cah cilik keluyuran rene?" (Ini mau apa anak kecil pagi-pagi sudah keluyuran kesini?).

62 Anotasi Putusan

70 Sosok

75 Pengadilan Inspiratif

Pengadilan Agama Tarempa terletak di Kabupaten Kepulauan Anambas dengan kordinat 106 13 BT dan 03 13 LU. Sebagian besar wilayah Tarempa terdiri dari lautan dan pulau-pulau yang tersebar di Perairan Laut Natuna dan Laut Cina Selatan.

80 Kilas Peristiwa

84 Aktual

88 Kisah Nyata

92 Ekonomi Syariah

Perkara ekonomi syariah di lingkungan peradilan agama harus ditangani oleh hakim yang sudah bersertifikat dan diangkat langsung oleh Ketua Mahkamah Agung.

96 Jinayah

99 Kelembagaan

Mulai tahun 2017, Badilag akan mengefektifkan penggunaan e-learning sebagai pengganti kegiatan bimbingan teknis bagi SDM peradilan agama seluruh Indonesia.

100 Insight

106 Resensi

108 Pojok Pak Dirjen



Tutup Tahun Genap Sepuluh Edisi

Tak terasa kita berada di pengujung tahun 2016 dan sebentar lagi menapaki tahun 2017. Tak terasa pula Majalah Peradilan Agama telah terbit sepuluh edisi dengan beragam pokok bahasan yang disajikan. Pembaca yang budiman tentu memiliki penilaian tersendiri dalam mendaras isi majalah di setiap edisinya. Tapi, yang jelas, seperti kata Pramodya Ananta Toer, barangsiapa merawat ilmu dengan menulis, suaranya tak akan padam ditelan angin, akan abadi sampai di kemudian hari. Kata-kata tersebut seperti cemeti yang terus menyemangati tim redaktur untuk menyajikan hal-hal baru dalam setiap rubrik Majalah Peradilan Agama.

Majalah Peradilan Agama edisi ke-10 mengangkat tema besar tentang dinamika hukum kewarisan Islam. Digarap serius di Daerah Istimewa Yogyakarta, majalah ini sedianya terbit lebih awal. Namun karena pertimbangan kendala teknis, akhirnya majalah diputuskan terbit di akhir tahun. Besar harapan kehadirannya semakin memompa semangat untuk menapaki tahun baru yang lebih baik dan bersemangat.

Ada banyak menu yang disajikan dalam majalah edisi kali ini. Demi memperkaya khazanah pemikiran tentang kewarisan Islam yang notabene dijadikan laporan utama, juga mengemukakan pendapat singkat para tokoh nasional tentang penegakan hukum waris Islam di peradilan agama. Bobot bahasan semakin kaya akan pespektif karena juga mengulas putusan tingkat pertama/banding terbaru yang fenomenal dan potensial dijadikan yurisprudensi.

Di akui karena sebagian besar redaktur adalah hakim, tentu diperlukan waktu ekstra untuk bisa menghasilkan konten yang baik. Hari-hari libur digunakan tim redaktur untuk mematangkan gagasan melalui diskusi dan pengayaan referensi. Tapi, tak ada istilah lelah dalam beramal jariyah. Setiap majalah diluncurkan, tim redaktur merasa mendapatkan kepuasan batin karena masyarakat luas bisa menikmati sajian akademis di dalamnya. Praktisi hukum, akademisi, mahasiswa, kalangan pesantren seakan tak mau melewatkan membaca majalah di setiap edisinya. Semakin bersemangat ketika terbangun dialektika antara pembaca dengan tim redaktur melalui berbagai sarana, entah berbentuk kritikan yang membangun maupun pengayaan cakrawala, sehingga semuanya menjadi pemanis Majalah Peradilan Agama.

Kami berharap di tahun-tahun mendatang Majalah Peradilan Agama semakin eksis, muatannya makin berbobot, dan memikat hati pembaca. Tentunya semua harapan tersebut memerlukan dukungan dan perhatian dari berbagai pihak, khususnya warga Peradilan Agama. Sebab, misi utama majalah ini sangat mulia untuk melestarikan khazanah keilmuan, terutama yang terkait dengan kewenangan Peradilan Agama.

Menyajikan konten majalah secara apik bukan pekerjaan mudah. Sama derajatnya dengan pekerjaan menulis. Untuk menulis dengan baik, kata David McCullough, kita harus berpikir jernih. Itulah kenapa menulis itu sulit. Maka dari itu, kami tetap berharap bisa kembali menyapa pembaca di tahun-tahun selanjutnya. Selamat membaca!



DEWAN PAKAR:

Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.Ip., M.Hum
Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.
Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.
Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.M., M.H.
Dr. H. Mukti Arto, S.H., M.Hum.
Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.

PENASEHAT:

Drs. H. Abdul Manaf, M.H.

PENANGGUNG JAWAB:

H. Tukiran, S.H., M.M.

REDAKTUR SENIOR:

Dr. H. Hasbi Hasan, M.H.
Dr. H. Fauzan, S.H., M.M., M.H.
Drs. H. Abd. Ghoni, S.H., M.H.
Arief Gunawansyah, S.H., M.H.
Bambang Subroto, S.H., M.H.
Sutarno, S.Ip., M.M.

REDAKTUR PELAKSANA:

Achmad Cholil, S.Ag., S.H., LL.M.

EDITOR:

Rahmat Arijaya, S.Ag., M.Ag.
Hermansyah, S.H.I.
Mahrus Abdurrahim, Lc., M.H.
Candra Boy Seroza, S.Ag., M.Ag.

DEWAN REDAKSI:

Dr. Ahmad Zaenal Fanani, S.H.I., M.S.I.
Dr. Sugiri Permana, M.H.
Achmad Fauzi, S.H.I.
Ade Firman Fathony, S.H.I., M.S.I.
Alimuddin, S.H.I., M.H.
Edi Hudiata, Lc., M.H.
M. Isna Wahyudi, S.H.I. M.S.I.
Mohammad M. Noor, S.Ag.

SEKRETARIAT:

Hirpan Hilmi, S.T.
Hj. Nita Sari, S.H., M.H.
H. Dedy Juniawan, S.H.
Zaenal Abidin, S.E.
Adnan Qori Widanu, S.H.

DESAIN GRAFIS/FOTOGRAFER:

Ridwan Anwar, S.E.
Iwan Kartiwan, S.H.

SIRKULASI/DISTRIBUSI:

Bagian Umum Sekretariat
Ditjen Badilag MA RI

DITERBITKAN OLEH:

Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Agama Mahkamah Agung RI

ISSN 2355-2476

ALAMAT REDAKSI:

Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Lt.6
Jl. Jend. Ahmad Yani Kav. 58 bypass
Cempaka Putih, Jakarta Pusat
Telp. (021) 290 79277; Fax. (021) 290 79211
Email: majalah.badilag@gmail.com
www.badilag.net

Dr. H. Agus Moh Najib, M.Ag

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta



BAGIAN WARIS BAGI ANAK TIRI DAN ANAK ANGKAT

(Anotasi terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 489 K/AG/2011)

Abstrak

Putusan Mahkamah Agung No. 489 K/AG/2011 memberikan bagian warisan bagi anak tiri dan anak angkat sebagai penerima sisa (*ashabah*). Dalam putusan tersebut, anak tiri dan anak angkat tidak saja mendapat sebagian besar harta warisan (87,5%), tetapi juga mengurangi (*hijab nuqshan*) bagian istri pewaris dari yang seharusnya mendapat $\frac{1}{4}$ menjadi $\frac{1}{8}$ bagian (12,5%) dari harta warisan. Tulisan ini berupaya mencari landasan hukum bagi hak kewarisan anak tiri dan anak angkat, di samping juga memberikan catatan kritis dan alternatif penyelesaian bagi perkara tersebut. Dengan menelusuri khazanah keilmuan waris Islam, anak tiri dan dan anak angkat dapat dimasukkan dalam kelompok *ashabah sababiyah* yang menerima sisa harta warisan, atau sebagai penerima wasiat wajibah yang dapat menerima maksimal $\frac{1}{3}$ bagian harta warisan. Namun dalam aplikasinya, hak *ashabul furud* sebagai ahli waris asli yang disebutkan dalam Al-Qur'an perlu diperhatikan dan tidak boleh dirugikan dalam pembagian warisan yang melibatkan anak tiri dan anak angkat ini.

Pendahuluan

Pembagian harta warisan dalam Islam telah dijelaskan dalam Al-Qur'an secara rinci, baik para ahli waris yang menerima maupun bagian masing-masing ahli waris tersebut.¹ Namun demikian, hal ini bukan berarti tidak ada peluang ijtihad dalam masalah hukum waris.

Apabila ditelusuri, sejak awal masa sahabat Nabi, telah banyak ijtihad dan inovasi dalam upaya menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum waris ini.² Praktek dan upaya ijtihad dalam hukum waris sebenarnya terus berlanjut, terlebih lagi pada masa kontemporer ketika struktur masyarakat dan keluarga mengalami perubahan yang sangat dinamis. Hazairin (w.1975), seorang pemikir hukum waris dari Indonesia, misalnya, menggagas konsep waris bilateral dan adanya ahli waris pengganti (*mawali*).³ Bahkan Munawir Sjadzali (w.2004) mengemukakan gagasan yang berbeda dengan bunyi teks Al-Qur'an. Ia menyatakan bahwa bagian waris anak perempuan saat ini, karena konteks dan situasinya berbeda dengan ketika ayat waris turun, seharusnya sama besar dengan bagian waris yang diterima anak laki-laki.⁴

Hasil ijtihad kontemporer terkait hukum waris Islam umumnya didasarkan pada prinsip keadilan yang dipandang sebagai nilai substansial dari ayat-ayat waris, sehingga ketentuan waris yang dianggap tidak mencerminkan nilai keadilan berusaha untuk direvisi dan direformulasi. Dalam ijtihad hukum waris kontemporer, konsep yang sering digunakan antara lain adalah wasiat wajibah. Konsep wasiat wajibah ini seringkali diberlakukan

² Untuk menyebutkan sebagian kecil hasil ijtihad para sahabat dalam masalah waris ini adalah masalah yang terkenal dengan sebutan gharawain, musyarakah, akdariah dan lain-lain. Masalah-masalah tersebut, walaupun merupakan inovasi penyelesaian waris yang brilian, tetapi tidak semua sahabat sependapat dengan hasil ijtihad tersebut.

³ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadith* (Jakarta: Tintamas, 1982), hlm. 16-17 dan 27-30.

⁴ Munawir Sjadzali, *Ijtihad Kemanusiaan* (Jakarta: Paramadina, 1997), hlm. 7-8 dan 70-71.

¹ Ayat-ayat waris dalam Al-Qur'an antara lain terdapat pada Q.S. Al-Nisa' (4): 7, 11-12, dan 176, Q.S. Al-Anfal (8): 76, Q.S. Al-Ahzab (33): 6.

sebagai jalan keluar untuk memberikan harta peninggalan bagi orang yang dianggap dekat dengan pewaris tetapi tidak mendapatkan bagian warisan, seperti cucu yang bapaknya meninggal terlebih dulu dari pada kakeknya, atau anak angkat dan orang tua angkat.⁵ Apabila dicermati, beberapa putusan Mahkamah Agung tentang waris beda agama juga sebenarnya menggunakan konsep wasiat wajibah ini. Putusan MA Nomor 368 K/AG/1995 yang memberikan hak waris anak yang beda agama dengan bagian yang sama dengan anak yang lain, atau Putusan MA Nomor 16 K/AG/2010 yang memberikan $\frac{1}{4}$ harta warisan bagi istri yang beda agama, pada dasarnya adalah menggunakan konsep wasiat wajibah, karena bagian yang diterima anak dan istri tersebut, walaupun menggunakan istilah waris dengan bagiannya yang spesifik (*al-furud al-muqaddarah*), namun tidak lebih dari maksimal jumlah wasiat, yaitu $\frac{1}{3}$ harta warisan.⁶

Berbeda dengan itu, putusan MA Nomor 489 K/AG/2011 menetapkan adanya hak waris bagi anak tiri dan anak angkat. Dalam putusan tersebut ditetapkan bahwa anak tiri dan anak angkat secara bersama-sama mendapat sisa harta warisan, yang apabila dihitung jumlahnya lebih dari $\frac{1}{3}$ harta warisan. Selama ini, anak angkat biasanya tidak menjadi ahli waris, tetapi mendapatkan bagian harta peninggalan melalui wasiat wajibah (maksimal $\frac{1}{3}$ harta warisan). Bahkan anak tiri biasanya tidak mendapat bagian waris apa-apa kecuali yang memang dihibahkan atau diwasiatkan oleh pewaris pada saat hidupnya. Putusan MA ini menarik untuk dikaji, karena memberikan harta warisan kepada anak tiri dan anak angkat melalui sistem *ashabah* (sisa harta warisan), dan bukan melalui wasiat wajibah. Tulisan ini berusaha membahas dan menganalisis putusan MA tersebut, namun supaya permasalahannya lebih jelas, akan dikemukakan terlebih dahulu deskripsi perkaranya.

Deskripsi Perkara

Putusan MA Nomor 489 K/AG/2011 ini merupakan perbaikan dari putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 297/Pdt.G/2010/PA.Mlg yang kemudian dikuatkan oleh putusan PTA Surabaya dengan Nomor 104/Pdt.G/2011/PTA.Sby.⁷ Dengan demikian, antara putusan *judex facti* yang ditetapkan oleh PA dan PTA ada perbedaan dengan

judex juris yang diputuskan oleh MA. Oleh karena itu, dalam deskripsi perkara ini dibagi sesuai dua putusan tersebut, hanya saja nama-nama pihak yang berperkara tidak disebutkan secara langsung.

Apabila ditelusuri ke belakang, asal usul perkara ini bermula dari adanya perkawinan antara Ibu A dan pak B, yang kemudian dikaruniai 4 (empat) orang anak kandung, 2 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Semasa hidupnya A dan B memiliki usaha Penginapan. Namun kemudian pak B meninggal dunia, dan Ibu A melanjutkan dalam mengelola usaha penginapan tersebut.

Ibu A (pada tahun 1966) kemudian menikah lagi dengan seorang laki-laki (C). Dengan perkawinan tersebut, Ibu A tetap melanjutkan usaha penginapan tersebut dibantu oleh suami keduanya (C). Pak C ini pada saat menikah dengan ibu A telah memiliki istri yang bernama Ibu D. Pak C dan Ibu D dalam perkawinannya tidak memiliki keturunan dan mengangkat seorang perempuan menjadi **Anak Angkat** (E).

Dalam upaya pengembangan bisnisnya, Ibu A dan pak C membeli sebidang tanah (pada tahun 1994) dan kemudian didirikan Penginapan. Luas tanah tersebut 1.220 meter persegi dan sertifikatnya di atas namakan pak C. Penginapan beserta tanahnya inilah yang kemudian menjadi **Obyek Sengketa**.

Ibu A kemudian (tahun 2003) meninggal dunia karena sakit dan diikuti pak C yang meninggal dunia dua tahun setelahnya (tahun 2005) juga karena sakit. Dengan meninggalnya Pak C, obyek sengketa berada di bawah penguasaan Ibu D sebagai istri pertama beserta Anak angkat (E) dan suaminya. Namun karena obyek sengketa tersebut sebenarnya merupakan hasil usaha bersama antara Pak C dan ibu A, maka empat anak kandung ibu A, yang berarti juga **Anak Tiri** pak C, menggugat kepada pihak yang menguasai obyek sengketa tersebut (Ibu D, anak angkat, dan suami dari anak angkat tersebut, sebagai para tergugat) supaya obyek sengketa dibagi secara adil, apalagi anak angkat dan suaminya pada dasarnya adalah bukan ahli waris dari pak C. Dengan demikian, empat anak tiri dari pak C inilah yang menjadi para penggugat (F).⁸

A. Putusan *Judex facti*

Putusan *judex facti* yang ditetapkan oleh PA, dan dikuatkan oleh PTA, terhadap perkara di atas secara singkat dapat dinyatakan sebagai berikut:

1. Obyek sengketa adalah harta bersama almarhum Pak C dengan kedua istrinya (almarhumah Ibu A dan Ibu D).

⁵ Dimulai oleh Mesir, beberapa Negara muslim memberlakukan konsep wasiat wajibah ini, tidak terkecuali di Indonesia. KHI pasal 209, misalnya, memberikan wasiat wajibah bagi anak angkat dan orang tua angkat.

⁶ Putusan MA tersebut dengan bahasa lain dapat dinyatakan dengan "anak perempuan beda agama mendapat wasiat wajibah yang jumlahnya sama dengan bagian ahli waris anak perempuan yang lain" dan "istri beda agama mendapat wasiat wajibah sebagaimana kedudukannya sebagai istri, yaitu mendapat $\frac{1}{4}$ bagian dari harta warisan".

⁷ Putusan MA Nomor 489 K/AG/2011, hlm. 1, 5, 6 dan 12.

⁸ Putusan MA Nomor 489 K/AG/2011, hlm. 1-5.

2. Menetapkan bagian masing-masing dari harta bersama tersebut di atas sebagai berikut:
 - a. Almarhum Pak C mendapat 1/3 bagian.
 - b. Ibu D mendapatkan 1/3 bagian.
 - c. Almarhumah Ibu A mendapatkan 1/3 bagian.
3. Menghukum para Tergugat (Ibu D, anak angkat dan suaminya) untuk menyerahkan 1/3 bagian dari harta bersama tersebut di atas kepada ahli waris dari almarhumah Ibu A, yaitu suami (almarhum Pak C) sebesar ¼ bagian dan anak-anak dari almarhumah Ibu A (para Penggugat) sebesar ¾ (Ashabah).
4. Menyatakan bahwa 1/3 bagian dari harta bersama ditambah bagian suami (almarhum Pak C) sebesar ¼ bagian tersebut di atas sebagai harta warisan (tirkah) dari almarhum Pak C.
5. Menetapkan bahwa Ibu D adalah ahli waris dari almarhum Pak C, dan E adalah anak angkat dari almarhum Pak C.
6. Menetapkan bagian ibu D sebagai ahli waris sebesar ¼ dari harta warisan almarhum Pak C dan bagian E sebagai anak angkat sebesar 1/3 dari harta warisan almarhum Pak C, serta sisa harta warisan almarhum Pak C diperuntukkan untuk LAZIS di Kecamatan tempat benda tersebut berada.⁹

Dalam putusan *judex facti* ini, apabila dicermati, terkait dengan beberapa masalah, yaitu *gono gini* terhadap harta bersama, wasiat wajibah, dan pemberian sisa harta warisan untuk baitul mal (kepentingan umum), yang dalam hal ini adalah LAZIS. Salah satu alasan tergugat untuk banding, dan kemudian kasasi, adalah putusan *judex facti* dipandang sebagai putusan *supra petita* atau putusan yang melebihi dari yang diminta oleh penggugat, yaitu antara lain memberikan sisa harta warisan untuk LAZIS.¹⁰

Putusan *judex facti* yang langsung memberikan sisa harta warisan kepada LAZIS ini berarti tidak mengikuti pendapat yang memberikan *radd* kepada istri atau suami. Putusan tersebut tidak memberikan *radd* kepada ibu D sebagai istri dan semua sisa harta waris diberikan untuk LAZIS. Para ulama memang berbeda pendapat ketika harta warisan tersebut masih sisa padahal telah dibagikan kepada *ashabul furud* yang ada dan tidak ada ahli waris *ashabah*. Apakah sisa harta warisan tersebut dikembalikan (*radd*) kepada ahli waris *ashabul furud* yang ada sesuai besaran bagiannya atau langsung diberikan ke baitul mal. Pendapat pertama, yang dikemukakan oleh Zaid ibn Tsabit dan diikuti oleh 'Urwah, Al-Zuhri, Al-Syafi'i, dan Malik, menyatakan bahwa sisa harta warisan tersebut langsung diberikan kepada baitul mal untuk kepentingan umum,

sehingga tidak ada *radd* untuk ahli waris *ashabul furud* yang pada dasarnya sudah mendapat bagian sesuai yang ditetapkan oleh Al-Qur'an. Pendapat kedua menyatakan bahwa sisa harta warisan tersebut diberikan kepada ahli waris *ashabul furud* termasuk suami dan istri sesuai dengan bagian yang diterima masing-masing. Pendapat ini dikemukakan oleh Usman Ibn 'Affan. Kemudian pendapat ketiga, yang dikemukakan oleh 'Umar, 'Ali dan mayoritas ulama, termasuk Abu Hanifah dan Ahmad Ibn Hanbal, menyatakan bahwa sisa harta warisan tersebut dikembalikan (*radd*) kepada ahli waris *ashabul furud* selain suami dan istri.¹¹

Menurut pendapat ketiga di atas, suami dan istri, berbeda dengan ahli waris yang lain, saling mewarisi adalah karena hubungan perkawinan, bukan hubungan nasab, sehingga keduanya tidak mendapatkan *radd*. *Radd* hanya diberlakukan bagi ahli waris karena hubungan nasab. Kemudian argumen pendapat kedua dan ketiga yang menyatakan adanya *radd* adalah karena *ashabul furud* memiliki hubungan yang lebih kuat dengan pewaris, yaitu hubungan nasab dan agama, dari pada baitul mal (kepentingan umum) yang hanya sekadar hubungan agama saja. Dengan demikian, apabila ada sisa harta warisan, maka *ashabul furud* lebih didahulukan dari pada baitul mal, yaitu dengan cara adanya *radd*.¹² Namun demikian, baitul mal masih tetap mungkin mendapat bagian, yaitu apabila tidak ada ahli waris, atau harta warisan tersebut tetap masih ada sisa setelah di-*radd*-kan sesuai bagian masing-masing *ashabul furud* yang ada.

Putusan *judex facti*, apabila dibandingkan dengan ketiga pendapat di atas, maka ada kemungkinan mengikuti pendapat pertama, yaitu tidak ada konsep *radd* bagi *ashabu al-furud*, atau bisa juga mengikuti pendapat ketiga yang menyatakan ada *radd*, tetapi kepada selain suami atau istri. Oleh karena itu, dalam putusan *judex facti*, ibu D sebagai istri tidak mendapatkan *radd*, dan sisa harta warisan langsung diberikan seluruhnya kepada baitul mal (LAZIS). Apabila dicermati, putusan *judex facti* ini tidak sesuai dengan ketentuan yang dikemukakan oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI pasal 193 cenderung kepada pendapat kedua di atas, yaitu sisa harta warisan di-*radd*-kan kepada seluruh ahli waris yang ada, tanpa mengecualikan suami dan istri. Pasal 193 KHI tersebut berbunyi:

"Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli waris Dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil dari angka penyebut, sedangkan

9 Putusan MA Nomor 489 K/AG/2011, hlm. 5-6.

10 Putusan MA Nomor 489 K/AG/2011, hlm. 6-10.

11 Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1998), III: 316.

12 *Ibid.*, III: 316-317. Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid* (Ttp.: Syirkah al-Nur Asia, t.t.), II: 264.

tidak ada ahli waris asabah, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara rad, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris, sedang sisanya dibagi berimbang di antara mereka.”

Sementara itu, baitul mal yang diterjemahkan oleh KHI sebagai Balai Harta Keagamaan (Ketentuan Umum Pasal 171(i)), hanya akan mendapat harta warisan apabila tidak ada ahli waris. KHI pasal 191 menyatakan:

“Bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali, atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan Pengadilan Agama diserahkan penguasaannya kepada Baitul Mal untuk kepentingan agama Islam dan kesejahteraan umum.”¹³

Dengan demikian, KHI mengakui adanya pembagian harta warisan secara *radd* kepada seluruh *ashabul furud* atau *dzawil furud*, termasuk suami atau istri, di samping juga mengakui baitul mal sebagai penerima harta warisan apabila memang tidak ada ahli waris yang lain.

Apabila dilihat, putusan *judex facti* memberikan bagian istri $\frac{1}{4}$ (25%) dari harta warisan dan bagian anak angkat $\frac{1}{3}$ (33,33%) melalui wasiat wajibah, maka sisanya yang diberikan ke LAZIS adalah $\frac{5}{12}$ atau 41,66% dari harta warisan. Dengan demikian, bagian yang paling kecil adalah justru yang diterima oleh istri sebagai *ashabul furud* dan ahli waris asli yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Sementara bagian yang paling besar adalah LAZIS, dan kemudian anak angkat. Padahal anak angkat di samping bukan ahli waris, juga wasiatnya bukan datang dari pewaris sendiri, tetapi berdasarkan atas keputusan hakim melalui wasiat wajibah. Sementara itu, adanya pemberian harta warisan untuk LAZIS (kepentingan umum, baitul

mal) pada dasarnya adalah pemberian harta waris untuk kemaslahatan umum apabila tidak ada ahli waris, padahal dalam kasus ini ahli waris itu ada. Dengan demikian, seharusnya ahli waris, dalam hal ini adalah istri dari pewaris, yang lebih diutamakan dari pada LAZIS dan juga anak angkat, terutama dalam hal besarnya bagian warisan yang diterima.

Apabila mengikuti ketentuan KHI, dengan mempertimbangkan juga pendapat yang pertama yang dikemukakan oleh Imam al-Syafi'i dan Imam Malik di atas bahwa baitul mal pada dasarnya sejak awal berhak memperoleh sisa harta warisan, maka *radd* hanya diberikan sesuai dengan bagian masing-masing ahli waris *ashabul furud*, dan apabila masih ada sisa maka diberikan kepada baitul mal. Oleh karena itu, walaupun memang masalah *khilafiyah*, putusan *judex facti*, menurut hemat penulis, sebaiknya ditetapkan dengan adanya *radd* untuk istri, sehingga ibu D sebagai istri mendapat bagian $\frac{1}{4}$ ditambah *radd* $\frac{1}{4}$ bagian, sehingga istri mendapat $\frac{1}{2}$ (50 %) bagian harta warisan. Kemudian anak angkat mendapat $\frac{1}{3}$ (33,33%) bagian sebagai jumlah maksimal dari wasiat wajibah, dan LAZIS (baitul mal) mendapat sisanya, yaitu $\frac{1}{6}$ bagian atau 16,66 % dari harta warisan. Dengan demikian, urutan besaran bagian harta warisan yang diperoleh adalah pertama istri (50%), kemudian anak angkat (33,33%) dan terakhir LAZIS (16,66%). Hal ini berbeda secara terbalik dengan putusan *judex facti* yang lebih mengutamakan LAZIS (41,66%), kemudian baru anak angkat $\frac{1}{3}$ bagian (33,33%) dan terakhir istri yang hanya mendapat $\frac{1}{4}$ bagian (25%). Di samping itu, putusan *judex facti* ini mengabaikan bagian bagi anak tiri, yang kemudian



dikoreksi oleh putusan *judex juris*, sebagaimana akan dikemukakan. Hubungan antara anak tiri dan pewaris, menurut *judex juris*, harus lebih diperhatikan karena tidak kalah dekatnya dibanding hubungan antara anak angkat dengan pewaris.

2. Putusan *Judex juris*

Sementara itu, putusan *judex juris* yang ditetapkan oleh MA secara singkat adalah sebagai berikut:

1. Amar putusan *judex facti* yang menguatkan putusan PA harus diperbaiki terkait sisa harta warisan setelah dikeluarkan bagian ibu D sebagai istri dan wasiat wajibah bagi anak angkat E. Sisa harta warisan yang diberikan kepada LAZIS (Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah) adalah tidak benar. Sisa harta seharusnya diberikan kepada anak tiri dari almarhum Pak C, yaitu para Penggugat, dengan alasan bahwa anak angkat saja diberi, maka tidak masuk akal apabila anak bawaan istrinya (anak tiri) disingkirkan begitu saja.
2. Terhadap kesimpulan di atas, ada pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) dari salah satu Hakim Agung. Pendapat tersebut didasarkan pada alasan bahwa anak tiri almarhum Pak C bukanlah ahli waris dan bukan pula *dzawil arham* dari almarhum Pak C, karena itu tidak ada alasan hukum apapun untuk menyerahkan sisa harta warisan almarhum Pak C kepada mereka. Mereka juga tidak bisa dibandingkan dengan anak angkat, karena anak angkat yang sah, berdasarkan hukum, yaitu Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan yurisprudensi, memang berhak terhadap harta peninggalan melalui wasiat wajibah. Dengan demikian, putusan *judex facti* yang menyerahkan sisa harta warisan almarhum Pak C kepada LAZIS setempat adalah tepat dan karenanya permohonan kasasi ini seharusnya ditolak.
3. Walaupun demikian, karena suara terbanyak berpendapat bahwa permohonan kasasi ditolak dengan perbaikan, yaitu dengan menyerahkan sisa harta warisan almarhum Pak C kepada anak tiri, maka permohonan kasasi ini akan diputus dengan tolak perbaikan.
4. Menetapkan bahwa obyek sengketa adalah harta bersama almarhum Pak C dengan kedua istrinya (almarhumah ibu A dan ibu D).
5. Menetapkan bagian masing-masing dari harta bersama tersebut di atas sebagai berikut:
 - a. Almarhum Pak C mendapat $\frac{1}{3}$ bagian = 33,34 %

- b. Ibu D mendapatkan $\frac{1}{3}$ bagian = 33,33 %
- c. Almarhumah Ibu A mendapatkan $\frac{1}{3}$ bagian = 33 %

6. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan bagian almarhumah Ibu A yang meninggal dunia pada tahun 2003, sebesar 33,33 % tersebut di atas, kepada para ahli warisnya sebagai berikut:
 - a. Pak C (suami) mendapat $\frac{1}{4} \times 33,33 \% = 8,33 \%$;
 - b. Anak kandung 1 (laki-laki) $\frac{2}{6} \times (33,33 \% - 8,33 \%) = 8,33 \%$;
 - c. Anak kandung 2 (perempuan) $\frac{1}{6} \times (33,33 \% - 8,33 \%) = 4,17 \%$;
 - d. Anak kandung 3 (laki-laki) $\frac{2}{6} \times (33,33 \% - 8,33 \%) = 8,33 \%$;
 - e. Anak kandung 4 (perempuan) $\frac{1}{6} \times (33,33 \% - 8,33 \%) = 4,17 \%$;
7. Menyatakan almarhum Pak C yang meninggal dunia tahun 2005, meninggalkan ahli waris seorang istri, yaitu ibu D, maka harta warisannya tersebut, yaitu $33,34 \% + 8,33 \% = 41,67 \%$, diberikan kepada:
 - a. Ibu D (istri) $\frac{1}{8} \times 41,67 \% = 5,21 \%$
 - b. Sisa sebesar 36,46 % dibagikan kepada empat anak tiri (anak bawaan almarhum Pak C dari istri almarhumah Ibu A, yaitu para Penggugat) dan seorang anak angkat (E), dengan pembagian sama besar, yaitu masing-masing = $\frac{1}{5} \times 36,46 \% = 7,29 \%$.¹⁴

Putusan *judex juris*, berbeda dengan putusan *judex facti*, menambahkan anak tiri sebagai penerima harta warisan, dengan argumen bahwa anak angkat saja mendapat harta warisan, maka anak tiri seharusnya lebih berhak. Oleh karena itu, sisa harta warisan, menurut putusan *judex juris*, tidak tepat apabila diberikan untuk LAZIS dan lebih tepat untuk diberikan kepada anak tiri dan angkat angkat. Pemberian bagian sisa harta warisan bagi anak tiri dan anak angkat oleh *judex juris* ini, apabila dicermati, bukan melalui wasiat wajibah, namun menempatkan kedudukan anak tiri dan anak angkat ini sebagai kelompok *ashabah* (penerima seluruh sisa). Hal ini dapat dilihat bahwa jumlah bagian yang diterima oleh anak tiri dan anak angkat adalah lebih dari $\frac{1}{3}$ harta warisan, yaitu $\frac{7}{8}$ bagian (sisa dari bagian Ibu D sebagai istri yang mendapat $\frac{1}{8}$ harta warisan). Di samping itu, kedudukan anak tiri dan anak angkat ini, oleh putusan *judex juris*, ditempatkan sebagaimana kedudukan anak kandung yang bisa meng-*hijab nuqshan* sehingga mengurangi bagian Ibu D sebagai istri dari $\frac{1}{4}$ bagian menjadi hanya $\frac{1}{8}$ bagian.¹⁵ Hanya saja, di sisi lain,

¹⁴ Putusan MA Nomor 489 K/AG/2011, hlm. 11-13.

¹⁵ *Hijab* dalam fikih waris diklasifikasikan menjadi dua, yaitu *hijab hirman* yang menghalangi seseorang untuk mendapatkan harta warisan, dan *hijab nuqshan* yang

anak tiri (2 laki-laki dan 2 perempuan) dan anak angkat (1 perempuan) tersebut semuanya mendapatkan bagian yang sama, dengan tidak membedakan jenis kelamin.

Analisis Putusan *Judex juris*:

Anak Tiri dan Anak Angkat sebagai Penerima Sisa Harta Warisan

Putusan *judex facti*, sebagaimana telah dikemukakan, memberikan sisa harta warisan langsung kepada baitul mal (LAZIS), setelah dibagi kepada *ashabul furud* yang ada (istri) dan wasiat wajibah untuk anak angkat. Sementara putusan *judex juris* memberikan semua sisa harta warisan tersebut kepada anak tiri dan anak angkat, dengan tidak menggunakan konsep wasiat wajibah dan tidak memberikan sedikitpun kepada baitul mal. Pemberian kepada LAZIS, menurut putusan *judex juris* dianggap tidak tepat. Apabila ditelusuri, mengenai sisa harta warisan setelah dibagi kepada *ashabul furud* dan kelompok *ashabah* tidak ada, dalam diskursus hukum waris Islam biasanya ditempuh jalan keluar melalui konsep *radd* atau pemberian kepada baitul mal.¹⁶ Mengenai konsep *radd* dan baitul mal, sebagaimana dikemukakan ketika membahas putusan *judex facti*, para ulama berbeda pendapat. Secara garis besar, ada ulama yang mengakui adanya konsep *radd* dan ada yang tidak. Kelompok yang mengakui adanya konsep *radd* juga berbeda pendapat tentang bisa tidaknya *radd* kepada suami atau istri. Sementara kelompok yang tidak mengakui adanya konsep *radd* berpendapat bahwa setelah dibagi kepada *ashabul furud* yang ada, maka sisa harta warisan langsung diberikan kepada baitul mal untuk kepentingan umum.

Putusan *judex facti* dapat dikatakan masih berada di seputar perbedaan di atas, dengan menambahkan adanya wasiat wajibah bagi anak angkat. Sementara itu, putusan *judex juris* di samping tidak mengikuti salah satu pendapat di atas, juga tidak mengikuti pendapat umumnya yang menggunakan konsep wasiat wajibah untuk memberikan harta warisan kepada orang yang dianggap dekat dengan pewaris tetapi tidak termasuk ahli waris. Putusan *judex juris* ini memberikan sisa harta warisan kepada anak tiri dan anak angkat. Bahkan sisa harta warisan yang diterima

tersebut persentasenya besar, karena bagian *ashabul furud* yang ada, dalam hal ini istri, ter-*hijab nuqshan* sehingga bagian yang diterima berkurang setengahnya dan masuk dalam sisa harta warisan tersebut.

Apabila dicermati, dalam diskursus hukum waris Islam terdapat konsep *ashabah sababiyah*. Konsep *ashabah sababiyah* ini merupakan bagian dari konsep *ashabah* secara umum yang biasanya dikaitkan dengan konsep *al-wala'*, yaitu pemberian bagian harta warisan dari bekas budak yang meninggal kepada bekas tuan yang memerdekakannya, sebagai balasan dari kebaikan tuannya tersebut dan kedekatan antara keduanya. Dalam beberapa literatur hukum waris Islam, terjadi perbedaan pendapat tentang kapan bekas tuan tersebut mendapat bagian warisan, apakah ketika bekas budak (pewaris) tidak memiliki ahli waris sama sekali, atau ketika tidak memiliki ahli waris nasabiyah, ataukah ketika tidak ada kelompok *ashabah* sehingga harta warisan masih sisa.¹⁷ Terlepas dari perbedaan pendapat tersebut, sebenarnya terdapat titik persamaan, yaitu ketika harta warisan bekas budak (pewaris) tersebut masih terdapat sisa. Adanya sisa harta warisan tersebut baik karena ada ahli waris *ashabul furud* tetapi tidak ada ahli waris *ashabah*, ataupun karena tidak ada ahli waris sama sekali. Bekas tuan yang menerima sisa harta warisan dari bekas budaknya tersebut dalam ilmu kewarisan Islam disebut sebagai *ashabah sababiyah*.¹⁸ Sebagai konsep *ashabah*, maka konsep *ashabah sababiyah* ini sama kedudukannya dengan *ashabah nasabiyah* yang dapat menghabiskan seluruh sisa harta warisan. Hanya saja, *ashabah sababiyah* ini baru mendapat bagian warisan apabila tidak ada *ashabah nasabiyah* dan harta yang telah dibagikan kepada *ashabul furud* masih terdapat sisa. Di samping itu, *ashabah sababiyah*, berbeda dengan *ashabah nasabiyah*, di samping tidak dapat menghibah *ashabul furud*, baik *hijab hirman* maupun *hijab nuqshan*, juga tidak membedakan jenis kelamin, karena orang yang memerdekakan budak tersebut bisa laki-laki ataupun perempuan.¹⁹

Pemberian seluruh sisa harta warisan kepada anak tiri dan anak angkat oleh putusan *judex juris*, menurut hemat penulis, bisa diposisikan dalam konteks *ashabah sababiyah* ini. Sebagaimana dalam konsep *al-wala'*, hubungan anak tiri dan anak angkat dengan orang tua tiri atau orang tua angkatnya terdapat rasa kasih sayang dan kedekatan sebagaimana kedekatan dalam hubungan

hanya mengurangi bagian seseorang dalam menerima harta warisan. As-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, III: 314.

16 Konsep *radd* dan baitul mal ini dijadikan sebagai jalan keluar ketika ada *ashabul furud* dan tidak ada ahli waris *ashabah*. Sementara apabila kasusnya tidak ada *ashabul furud* dan juga tidak ada *ashabah*, maka para ulama menggunakan konsep dzawil arham. Walaupun mereka juga berbeda pendapat tentang bisa tidaknya dzawil arham ini sebagai ahli waris. Zaid Ibn Tsabit, Ibnu Abbas, Al-Syafi'i dan Malik berpendapat dzawil arham tidak bisa mewarisi, sehingga harta warisan langsung diberikan kepada baitul mal. Sementara Umar, Ibnu Mas'ud, Abu Hanifah dan Ahmad Ibn Hanbal berpendapat bahwa dzawil arham lebih didahulukan dari pada baitul mal. Muhammad 'Ali al-Shabuni, *Al-Mawaris fi al-Syar'ah al-Islamiyyah fi Dhau al-Kitab wa al-Sunnah* (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 2010), hlm. 159-160.

17 *Ibid.*, hlm. 61. Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, II: 271. Muhammad Abu Zahrah, *Muhadarat fi al-Mirats 'inda al-Ja'fariyyah* (Ttp.: Ma'had fi al-Dirasat al-'Arabiyyah al-'Aliyyah, t.t.), hlm. 51-52 dan 57.

18 Al-Shabuni, *Al-Mawaris*, hlm. 61.

19 Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, III: 313.

nasab. Oleh karena itu, nabi bersabda bahwa: *al-wala'* (kekerabatan karena memerdekakan budak) itu daging sebagaimana daging nasab, *al-wala' luhmah ka luhmah al-nasab*.²⁰ Atas dasar hadis ini, menurut pendapat penulis, apabila bekas tuan tersebut meninggal dan tidak ada ahli warisnya, atau masih terdapat sisa dan tidak ada kelompok *ashabah nasabiyyah*, maka bekas budak tersebut bisa mendapatkan bagian harta warisan juga dengan konsep *al-wala'* ini. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa keduanya bisa saling mewarisi. Demikian juga halnya dengan anak tiri dan anak angkat dalam hubungannya dengan orang tua tiri atau orang tua angkatnya.

Di samping itu, hubungan antara anak tiri dan anak angkat dengan orang tua tiri atau orang tua angkatnya bisa juga dimasukkan dalam konsep *al-mu'aqadah* (janji persaudaraan) yang menurut Al-Qur'an termasuk di antara sebab adanya saling mewarisi.²¹ Namun demikian, walaupun posisinya anak, tiri ataupun angkat, tetapi dalam hukum kewarisan tidak bisa disamakan dengan kedudukan anak kandung. Sama dengan posisi bekas tuan dari budak yang kedudukannya tidak sama dengan ayah, maka posisi anak tiri dan anak angkat tersebut tidak bisa menghibah *ashabul furud* dan hanya akan mendapat bagian apabila masih ada sisa harta warisan setelah dibagi kepada *ashabul furud*. Oleh karena itu, sering dikatakan bahwa *ashabah sababiyyah* akan mendapat bagian warisan apabila memang harta warisan tersebut masih ada sisa dan tidak ada *ashabah nasabiyyah*.

Dari uraian-uraian di atas, dapat dilihat bahwa mengenai sisa harta warisan setelah dibagi kepada *ashabul furud*, para ulama hanya sepakat pada adanya hak bagi *ashabah nasabiyyah*. Namun ketika tidak ada *ashabah nasabiyyah*, mereka berbeda pendapat tentang siapakah yang lebih didahulukan untuk menerima sisa harta warisan tersebut. Ada yang lebih mendahulukan baitul mal, ada yang lebih mengutamakan *radd*, dan ada juga yang mengutamakan untuk memberikannya pada *ashabah sababiyyah*, dengan pengertiannya yang baru. Mengenai urutan siapa yang lebih didahulukan, ini merupakan masalah ijtihadiyah, sehingga penyelesaiannya perlu melihat kasus per kasus yang sekiranya dapat mendekati rasa keadilan para pihak. Namun demikian, secara umum, menurut hemat penulis, konsep *radd* perlu diperhatikan, karena di samping *ashabul furud* merupakan orang yang terdekat dengan pewaris, juga biasanya setelah di-*radd*-

kan harta warisan tersebut masih sisa, yang bisa diberikan kepada *ashabah sababiyyah* atau baitul mal. Sementara apabila mengabaikan *radd*, dan langsung diberikan kepada *ashabah sababiyyah* atau baitul mal, maka sangat mungkin terjadi *ashabul furud* akan mendapatkan bagian lebih kecil dari pada *ashabah sababiyyah* atau baitul mal.²² Dengan kata lain, *radd* bisa saja diabaikan apabila *ashabul furud* sudah mendapatkan bagian yang dianggap cukup dan adil. Misalnya ahli waris hanya terdiri dari anak perempuan tunggal, maka anak perempuan akan mendapat $\frac{1}{2}$ harta warisan, sehingga kemudian tidak perlu di-*radd*-kan dan sisanya bisa langsung diberikan kepada *ashabah sababiyyah*.

Atas dasar uraian di atas, dapat dilihat bahwa dalam menyelesaikan perkara tersebut putusan *judex facti* lebih mendahulukan baitul mal, dengan mempertimbangkan juga anak angkat untuk mendapat wasiat wajibah, sementara putusan *judex juris* lebih mengutamakan *ashabah sababiyyah*. Namun demikian, keduanya tidak mempertimbangkan adanya *radd* bagi *ashabul furud* yang ada. Bahkan putusan *judex juris*, sebagaimana dikemukakan, mengurangi bagian istri (ibu D) dari $\frac{1}{4}$ menjadi $\frac{1}{8}$ bagian, dengan demikian istri hanya mendapat bagian 12,5% ($\frac{1}{8}$), sementara sisanya, yaitu $\frac{7}{8}$ (87,5%) diberikan kepada anak tiri dan anak angkat sebagai *ashabah sababiyyah*. Di sini istri sebagai *ashabul furud* yang merupakan ahli waris asli mendapatkan bagian yang sangat sedikit, sementara bagian anak tiri dan anak angkat sebagai ahli waris hasil ijtihadi mendapat bagian harta warisan yang banyak. Menurut hemat penulis, seharusnya istri tidak ter-*hijab nuqshan* sehingga bagiannya tetap mendapat $\frac{1}{4}$ bagian, karena *ashabah sababiyyah*, sebagaimana dikemukakan, tidak bisa menghibah *ashabul furud*.²³ Kemudian patut juga dipertimbangkan adanya *radd* bagi istri, sehingga bagian istri adalah $\frac{1}{4}$ ditambah *radd* $\frac{1}{4}$ sehingga menjadi $\frac{1}{2}$ (50%) bagian dari harta warisan. Baru kemudian sisanya, yaitu $\frac{1}{2}$ (50%) diberikan secara merata kepada anak tiri dan anak angkat yang ada. Dengan demikian, istri sebagai ahli waris asli tidak banyak dirugikan.

Di samping penyelesaian di atas, dapat juga putusan *judex juris* tersebut menggunakan konsep wasiat wajibah, dengan tetap mendahulukan *ashabul furud* (istri) untuk mendapatkan hak *radd*. Apabila seperti itu, maka hasilnya adalah istri mendapat $\frac{1}{4}$ bagian ditambah *radd* $\frac{1}{4}$ sehingga menjadi $\frac{1}{2}$ (50%) bagian, kemudian anak tiri dan anak

20 Muhammad Ibn Isma'il al-Shan'ani, *Subul al-Salam Syarh Bulug al-Maram min Jam'i Adillah al-Ahkam* (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 2006), hlm. 654.

21 Q.S. Al-Nisa' (4): 33 menyebutkan ahli waris dengan jalan sumpah setia (*walladzina 'aqadat aimanukum fa atuhum nashibahum*), walaupun ulama berbeda pendapat mengenai apakah sebab mewarisi dengan jalan sumpah setia ini telah dinasakh atau belum.

22 Al-Qur'an sendiri mengingatkan untuk memperhatikan keturunan supaya tidak lemah, termasuk masalah harta yang ditinggalkan. Q.S. Al-Nisa' (4): 9.

23 Anak yang dapat mengurangi (*hijab nuqshan*) bagian istri adalah hanya anak kandung. KHI pasal 180 menyatakan: "Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperempat bagian."

angkat mendapat 1/3 (33,33%) sebagai jumlah maksimal dari wasiat wajibah. Sementara sisanya yang 1/6 (16,66%) diberikan kepada baitul mal (LAZIS) untuk kepentingan umum. Dengan penyelesaian seperti ini, terlihat juga bahwa istri sebagai *ashabul furud* lebih diutamakan dari pada anak angkat dan anak tiri, dan tetap bisa memberikan bagian kepada baitul mal dengan jumlah yang lebih kecil. Apabila dicermati, penyelesaian ini selaras dengan muatan hukum yang terdapat dalam KHI. Sebagaimana dikemukakan, KHI mengakui adanya *radd*, termasuk bagi suami dan istri (Pasal 193), serta memberikan bagian melalui wasiat wajibah bagi anak angkat (pasal 209) dan dalam hal ini bisa dimasukkan anak tiri dengan cara analogi, serta baitul mal yang bisa mendapat bagian sebagai alternatif terakhir (pasal 191).

Catatan Penutup

Perkara yang menjadi pokok bahasan dalam tulisan ini adalah adanya sisa harta warisan setelah dibagi kepada *ashabul furud*, sementara kelompok *ashabah*nya tidak ada. Dalam masalah ini memang terjadi perbedaan pendapat para ulama mengenai cara penyelesaiannya dan urutan prioritas penggunaan cara tersebut. Cara penyelesaian yang dikemukakan para ulama adalah dengan cara *radd* kepada *ashabul furud*, pemberian kepada baitul mal, dan pembagian sisa harta kepada *ashabah sababiyyah*. Sebagaimana dikemukakan, putusan *judex facti* lebih memprioritaskan pemberian kepada baitul mal (LAZIS), sementara *judex juris* lebih mengutamakan *ashabah sababiyyah* dengan maknanya yang diperluas. Di samping itu, dua putusan tersebut, menurut hemat penulis, kurang memperhatikan hak *ashabul furud* dengan mengabaikan

pemberlakuan *radd*, sehingga bagian yang diterima oleh *ashabul furud* jauh lebih sedikit dibanding bagian yang diterima oleh baitul mal ataupun *ashabah sababiyyah*.

Anak tiri dan anak angkat dapat dimasukkan dalam kelompok *ashabah sababiyyah* karena terdapat 'illat (kausa hukum) yang sama dengan konsep *al-wala'*. Hal yang bisa menjadi sebab adanya kewarisan antara tuan dan bekas budaknya adalah karena adanya rasa kasih sayang dan kedekatan antara keduanya sehingga terjadi proses pemerdekaan dari tali perbudakan tersebut. Begitu pula dengan hubungan antara anak tiri dan anak angkat dengan orang tua tiri atau orang tua angkatnya. Di samping itu, antara anak tiri dan anak angkat dengan orang tua tiri atau orang tua angkatnya pada dasarnya terjalin semacam sumpah setia (*al-mu'aqadah*) yang dalam Al-Qur'an Surat Al-Nisa' (4) ayat 33 bisa sebagai sebab saling mewarisi. Namun demikian, sebagai *ashabah sababiyyah*, anak tiri dan anak angkat hanya akan mendapat bagian warisan apabila terdapat sisa harta warisan setelah dibagi kepada *ashabul furud* yang ada dan tidak ada *ashabah nasabiyyah*. Di samping itu, apabila tidak sebagai *ashabah sababiyyah*, anak tiri dan anak angkat juga bisa mendapatkan bagian harta warisan melalui wasiat wajibah. Dalam kedudukannya sebagai penerima wasiat wajibah ini tidak disyaratkan adanya sisa harta warisan setelah dibagi kepada *ashabul furud* dan tidak adanya *ashabah nasabiyyah*, sehingga sejak awal anak tiri dan anak angkat bisa mendapat bagian harta warisan dengan maksimal 1/3 dari jumlah harta warisan.

Perbedaan pendapat dalam menetapkan hukum seperti dalam putusan *judex facti* dan *judex juris*, apalagi dalam masalah-masalah ijtihadi, merupakan hal yang wajar. Namun hal ini, terutama dalam lembaga peradilan, tentu saja mengurangi kepastian hukum bagi masyarakat. Sebenarnya apabila mengikuti muatan hukum yang ada dalam KHI dengan memberlakukan konsep *radd*, di samping juga memperhatikan wasiat wajibah dan kemungkinan baitul mal mendapat sisa harta warisan, maka keseragaman putusan hakim tersebut lebih mungkin untuk dilakukan. Namun demikian, KHI tampaknya tidak cukup kuat sebagai hukum materil yang harus dipedomani oleh para hakim. Memang, dari materi hukum yang ada dalam KHI, hanya bidang kewarisan saja yang tidak ada undang-undangnya. Bidang perkawinan sudah ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga bidang perwakafan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Oleh karena itu, demi kepastian hukum bagi para pencari keadilan, perlu kiranya segera diupayakan adanya undang-undang Kewarisan Islam sebagai hukum materil bagi lembaga peradilan agama.[]



**Selamat dan Sukses
Atas Dilantiknya Yang Mulia**



Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.

**Sebagai Hakim Agung
Pada Mahkamah Agung RI**



**KELUARGA BESAR
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
MAHKAMAH AGUNG RI**

Selamat Tahun Baru 2017



**KELUARGA BESAR
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
MAHKAMAH AGUNG RI**